

KONSEP DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: STUDI KASUS DI MADRASAH SE-JAWA TIMUR

Ikhwanul Muslimin

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Ikhwanulm3@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia masih hangat memperbincangkan terkait kurikulum merdeka belajar. Masih terbatas rujukan mengenai teori, konsep, dan implementasi dari kurikulum merdeka belajar khususnya pada Lembaga Pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas konsep kurikulum merdeka belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kendala, hingga solusi pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur. Artikel dibuat berdasarkan penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif versi Miles-Huberman. Disimpulkan bahwa konsep perencanaan dan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur dilakukan melalui dua proses. 1) Sosialisasi empat pilar kurikulum merdeka belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama dengan Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. 2) Menyiapkan infrastruktur seperti EMIS (Education Management Information System), sistem e-learning seperti PINTAR dan Mandiri Belajar untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka belajar.

Kata kunci: Kurikulum, Merdeka Belajar, Lembaga Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Banyak madrasah unggulan yang dulu hanya bisa diikuti oleh Peserta Didik pintar dan Peserta Didik dari golongan keluarga menengah keatas. Sementara itu, Peserta Didik yang kemampuan terbatas, terutama dari keluarga miskin, sangat sulit diterima dimadrasah favorit dan unggulan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan dan persamaan hak atas pendidikan di masyarakat. Sungguh aneh jika rumahnya dekat dengan madrasah, ia tidak diterima di madrasah tersebut karena ia tidak pintar atau

berasal dari keluarga miskin. Kemudian sejak kurikulum 2004-2006 atau KBK-KTSP, tuntutan kompetensi peserta didik harus ada pada semua ranah, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pelaksanaan ujian juga harus mengevaluasi ketiga domain tersebut. Namun kenyataannya di UN (Ujian Nasional) hanya aspek kognitif saja yang dinilai dan menjadi penentu hidup bagi peserta didik.¹

Kemudian pada kurikulum 2013 (K-13) dinilai lebih komprehensif dalam hal penilaiannya. Penilaian K-13 lebih bersifat holistik dalam mengukur kompetensi peserta didik, yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.² Oleh karena itu, jika pemerintah menyelenggarakan UN, maka idealnya keempat kompetensi tersebut perlu dilaksanakan. Namun kenyataannya di lapangan, UN hanya menguji kompetensi kognitif saja, sedangkan kompetensi lainnya terabaikan. Sehingga berangkat dari permasalahan yang mengekang madrasah, mengikat kebebasan guru dan membelenggu Peserta Didik, serta memikul beban berat bagi orang tua, konsep kurikulum merdeka belajar merupakan terobosan kebijakan untuk perbaikan dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan islam. Namun karena ini merupakan hal yang baru, maka perlu menjadi perhatian semua pihak dalam pelaksanaannya kurikulum merdeka belajar.

Kebijakan kurikulum merdeka belajar digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan menjadi solusi atas berbagai masalah yang terjadi, terutama hal penetapan orientasi tujuan pendidikan. Kebijakan tentang merdeka belajar muncul di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0 saat ini. Era revolusi industry 4.0 dan society 5.0 yang memiliki tantangan sekaligus peluang bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia.³ Pada konteks era revolusi industry 4.0, syarat utama untuk maju dan berkembang sebuah lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi dan berkolaborasi.

Inovasi dan kolaborasi diperlukan dalam era revolusi industry 4.0 dan society 5.0, jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi maka kemungkinan akan tertinggal. Sebaliknya, sebuah lembaga pendidikan akan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa dalam kebijakna

¹ Lutviyana Hidayah, "Asesemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya: Indonesia," *AlMafahim: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 2 (2020): 11–20.

² H. Fajri Ismail, "Pro Kontra Ujian Nasional," *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (September 1, 2015): 301–24.

³ Ayang Sari et al., "Penghapusan Ujian Nasional Tahun 2021 Dalam Perspektif Guru SMA Di Kota Tebing Tinggi," in *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI) - 3* (FBS Unimed Press, 2021), 213–20, <http://digilib.unimed.ac.id/41244/>.

pendidikan yaitu membelajarkan manusia yang merdeka. Artinya, lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik untuk dapat memiliki kemampuan berfikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif, ketrampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, keterampilan mencari, keterampilan mengelola, keterampilan menyampaikan informasi serta keterampilan menggunakan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan zaman.⁴

Tujuan dari kurikulum merdeka belajar memang didesain agar peserta didik memiliki banyak alternatif kompetensi dan keterampilan yang relevan, dikembangkan dimasa depan. Dibarengi dengan basis pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tauhid secara radikal (mendalam dan mengakar kuat), kebebasan memilih bidang yang ditekuni dan praktik pembelajaran yang menjadi kebutuhan dan proyeksinya dimasa mendatang. Selanjutnya upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam juga telah ditanamkan melalui metode penguatan karakter berupa nilai keimanan, nilai ibadah, nilai akhlakul karimah dengan memadukan kebiasaan agama Islam dalam kurikulum merdeka belajar.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pejabat di Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, beberapa Kepala Madrasah, dan Guru. Kemudian melakukan observasi dengan beberapa pemangku kepentingan dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, serta beberapa Kepala Madrasah dan Guru di Provinsi Jawa Timur. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles-Huberman. Alur yang digunakan dalam menafsirkan data penelitian ini dikumpulkan, disajikan, direduksi, dan diverifikasi.⁵

*Kalimat tersebut sengaja *ditext-bold* oleh peneliti agar pembaca dapat dengan mudah memahami intisari dari topik penelitian ini.

⁴ Ridwan Abdullah Sani, *Pembelajaran Berorientasi AKM: Asesmen Kompetensi Minimum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 13

⁵ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, trans. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992). 22

KAJIAN TEORI

Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam

Konsep kurikulum merdeka belajar sama dengan pendidikan humanistic yang menekankan pada kebebasan, pilihan, kepekaan dan tanggung jawab peserta didik. Pendidikan humanistic menerapkan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian peserta didik, dan berfokus pada potensinya untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka miliki. Bahkan menurut para ahli pendidikan, dalam penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya peserta didik berpikir yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain akan tetapi biasakan peserta didik mencari sendiri segala pengetahuannya dengan menggunakan pikiran sendiri.⁶ Hal itu karena seorang peserta didik pada dasarnya mampu berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan melalui dirinya.

Merdeka belajar merupakan proses pendidikan untuk menciptakan suasana-suasana pembelajaran yang membahagiakan dan menggembirakan. Merdeka belajar menuntut para guru, peserta didik, serta orang tua membangun suasana yang bahagia di lingkungan mereka.⁷ Merdeka Belajar mengembalikan literasi pendidikan kepada khittahnya sebagai momentum yang strategis untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Terwujudnya proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif perlu mengembangkan potensi dirinya, agar literat dalam spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik dalam mengembalikan pendidikan pada *khittah*-nya. Hal ini mampu memerdekakan guru dalam mengajar; memberi ruang kreativitas Peserta Didik dalam belajar sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Literasi pendidikan selalu mempersilakan rasa ingin tahu, terjadi komunikasi dialogis, ada ruang kreativitas; mampu berkolaborasi untuk meraih kepercayaan diri.

Guru yang memerdekakan proses pembelajaran dimana guru yang bisa membuat Peserta Didik merdeka berfikir, Peserta Didik merdeka

⁶ Nurul Istiq'faroh, "Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia," *Lintang Songo : Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (August 31, 2020): 1–10.

⁷ Houtman Houtman, "Merdeka Belajar dalam Masyarakat 5.0" (Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Universitas PGRI Palembang: Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2020).

berkreativitas, Peserta Didik merdeka berimajinasi, Peserta Didik merdeka berekspresi. Menciptakan strategi pembelajaran yang memerdekakan membuat aktivitas belajar mengajar lebih menekankan pada keterampilan berfikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis.⁸ Menggali Peserta Didik agar berfikir divergen, Peserta Didik dapat memecahkan masalah pada proses pembelajaran. Inilah yang perlu dibangun oleh semua pihak untuk mengembalikan pendidikan pada khittahnya.

Merdeka belajar artinya kebebasan belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sebebas mungkin untuk belajar dengan tenang, santai, dan bahagia tanpa stres dari tekanan dengan memperhatikan bakat alami mereka, tanpa memaksa peserta didik untuk belajar atau menguasai suatu bidang ilmu di luar hobi dan kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki portfolio yang sesuai dengan passion.⁹ Hal ini bukan berarti peserta didik menindaklanjuti ilmu dan pengetahuan yang didapatkan seenaknya. Merdeka Belajar ini justru mengharuskan peserta didik untuk dapat berpikir kritis tentang masa depan yang dapat diraihinya jika mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Apabila rangkaian tersebut dapat terlaksana, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pendidik akan tercapai secara maksimal. Adanya bekal kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari dan dimiliki, peserta didik diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang akan dihadapinya di masa mendatang.¹⁰

Pendidikan selalu mengupayakan terciptanya peserta didik yang selalu melakukan pembaharuan setiap waktu. Tidak hanya mampu berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Perubahan dan inovasi yang dihasilkan tersebut mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.¹¹ Itulah sebabnya konsep belajar diharapkan mampu melakukan inovasi-inovasi dalam setiap proses pembelajarannya yakni pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik agar mendukung tercapainya

⁸ Dhina Cahya Rohim, "Konsep Asesmen Kompetensi Minimum Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal VARIDIKA* 33, no. 1 (July 30, 2021): 54–62, <https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.14993>.

⁹ Wijaya Kusumah and Tuti Alawiyah, *GURU PENGGERAK: Mendorong Gerak Maju Pendidikan Nasional* (Surabaya: Penerbit Andi, 2021). 37

¹⁰ Fattah Amal Iko Rusmana, "Memerdekakan Siswa Melalui Pendidikan: Konsepsi Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (1889-1959)" (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016), <http://repository.unj.ac.id/724/>.

¹¹ Kadek Ari Wisudayanti, "Kesiapan Menghadapi Perubahan Pada Guru Sekolah Dasar Terhadap Pendidikan Multikultural," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 2, no. 1 (July 5, 2021): 75–86.

lulusan yang berkualitas yang siap menghadapi situasi zaman yang terus berubah. Perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati (antar pelaku pendidikan) dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan (sebagai bagian dari proses pembelajaran) untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan.

Nilai-nilai Islam Dalam Kurikulum Merdeka Belajar

Nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak. Nilai-nilai aqidah mengajarkan peserta didik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wata'ala, menumbuhkan sikap berserah diri dan berusaha untuk selalu menjalankan perintahnya serta merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan mereka.¹² Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada peserta didik agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas untuk mencapai ridha Allah SWT.

Pengamalan nilai-nilai ibadah akan mencetak generasi yang memiliki sikap-sikap mulia dihadapan manusia seperti adil, jujur, dan suka menolong sesama. Aspek nilai pendidikan Islam yang ketiga adalah nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada peserta didik untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawanya kepada kehidupan yang tentram, harmonis, damai, dan seimbang. Dengan demikian, jelas bahwa nilai-nilai pendidikan Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹³

Merdeka belajar secara konseptual dan faktual merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Implementasi merdeka belajar di masa kejayaan peradaban Islam tercermin pada banyaknya ulama dan ilmuwan yang multitelenta dan multidisiplin ilmu. Tentu, mereka mampu seperti itu bukan karena konsep kurikulum merdeka belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap mental pembelajar yang kuat, tekun, ulet, kreatif, dan produktif, sehingga mereka banyak mewariskan legasi keilmuan yang cemerlang dan menjadi rujukan hingga abad ini. Kurikulum merdeka belajar bukan konsep utopis, tetapi merupakan gagasan dan tawaran strategis disaat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, dan menuntut penguasaan multikeilmuan dan keterampilan.

¹² Masduki Duryat, *"DEWA" Mengabdikan Untuk Negeri; Membangkitkan Kejayaan Dan Konsistensi* (Sleman: Deepublish, 2020). 31

¹³ H. E. Mulyasa, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 12

Merdeka belajar berdasarkan perspektif Islam berasal dari keyakinan teologis (tauhid) yang memerdekakan diri pembelajar. Keyakinan teologis ini berimplikasi kepada sikap kritis bahwa sumber kebenaran ilmu, baik melalui proses pembelajaran maupun pengalaman empirik, berasal dari Allah SWT. Dengan demikian, merdeka belajar itu sejatinya merupakan fitrah, kecenderungan alami dan kecintaan terhadap kebijaksanaan (filsafat) yang ditanamkan oleh Allah pada diri manusia. Merdeka belajar bukan sekadar bebas tanpa batas dalam belajar, mempelajari, dan mencari ilmu pengetahuan. Akan tetapi, merdeka belajar dalam Islam merupakan spirit untuk memenuhi rasa ingin tahu (ketertarikan) dan rasa ingin *ma'rifatullah* (mengetahui Allah), di samping rasa ingin menguasai dan mendalami ilmu pengetahuan dan keterampilan secara tidak “dibatasi” oleh sekat-sekat kejurusan dan keprofesian. Spirit merdeka belajar itu sejatinya belajar menguasai kompetensi dan keterampilan secara lebih luas dan multidisiplin ilmu.¹⁴

Kebijakan dari kurikulum merdeka belajar itu harus bervisi profetik, berbasis tauhid sejati, bukan semata-mata mencari ilmu untuk ilmu, tetapi belajar secara merdeka dalam rangka menghambakan dan mendedikasikan diri kepada Sang Khalik atau Tuhan Semesta Alam. Karena itu, apapun yang dikuasai manusia seperti ilmu, harta, aset, jabatan, status sosial, dan sebagainya hanyalah bersifat nisbi, sementara, dan tidak abadi. Semuanya pada dasarnya berasal dan milik Allah secara mutlak. Dengan kata lain, merdeka belajar itu dimaknai dalam kerangka ibadah kepada Allah di satu segi, dan di segi lain dimaksudkan untuk memakmurkan (*‘imarah*) kehidupan dan memajukan peradaban kemanusiaan.

Implementasi kurikulum merdeka belajar yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam penting dikembangkan karena memang dalam Islam tidak membatasi dan mengekang umatnya dalam mempelajari segala hal. Allah bahkan menantang manusia dan jin untuk menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi jika mampu melakukannya. Allah kemudian menegaskan bahwa kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan (*sulthan*). (QS ar-Rahman/55:33) Menurut Ibn Katsir, yang dimaksud *sulthan* dalam ayat ini adalah kekuasaan (bisa berupa kemampuan hebat). Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian *sulthan* dalam ayat tersebut adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa, melintasi batas, dan menguasai alam raya ini. Fakta sejarah membuktikan bahwa para ulama di masa lampau telah mengamalkan konsep merdeka belajar,

¹⁴ Iskandar Tsani et al., “Evaluasi Model Cipp pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7 di Provinsi Jawa Timur,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (July 11, 2021): 17–45, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.8165>.

sehingga mereka cenderung banyak menguasai bidang keilmuan, tidak monodisiplin. Contohnya al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, al-Ghazali, al-Khawarizmi, Ibn al-Haitsam, Ibn Miskawaih, dan sebagainya. Ibn Sina misalnya, tidak hanya pakar dibidang kedokteran, tetapi juga menguasai ahli fikih, filsafat, matematika, logika, bahasa, musik, dan sebagainya. Bahkan di usia yang masih 8 tahun, beliau sudah hafal Al-Qur'an.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Konsep kurikulum merdeka belajar merupakan tawaran baru dalam dunia pendidikan. Dengan membebaskan proses belajar, prestasi belajar juga akan lebih baik. Mengutip pengertian dari Siti Mustaghfiroh, kurikulum yang berpusat pada peserta didik memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam memproduksi pengetahuan dan pembelajaran.¹⁵ Hal tersebut hanya dapat terjadi jika kepercayaan diri pembelajar didorong oleh perasaan kontrol dan kemampuan untuk mengelola kemajuannya dalam memperoleh kualifikasi. Guru abad ke-21 harus menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung empat Pilar Pembelajaran (*learning to know, learning to do, learning to be, learning to life together*), tetapi juga membuat peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait.

Konsep kurikulum merdeka belajar diimplementasikan dengan pemberian kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Peserta didik mengetahui dan menikmati hak-hak belajarnya di dalam kelas dan di luar kelas, dengan fasilitasi yang mendukung dan menyukseskan sistem dan pola belajar mereka. Implementasi kurikulum merdeka belajar, menghendaki kesamaan sikap, pandangan, dan orientasi. Kurikulum merdeka belajar diinspirasi oleh tantangan hidup di masa depan yang menuntut penguasaan lebih dari disiplin keilmuan dan keterampilan. Kurikulum merdeka belajar juga sejalan dengan konsep pembelajaran transformatif, konsep pendidikan memerdekakan, *Experimental Learning*, dan *Contextual Teaching and Learning*.¹⁶

Penerapan kurikulum merdeka belajar membutuhkan sumber daya manusia menjadi lebih dapat dioptimalkan dan mereka memiliki pengalaman baru, sekaligus situasi dan kondisi pembelajaran yang memungkinkan mereka terlibat aktif dalam memproduksi dan mengonstruksi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan implementasi kurikulum merdeka belajar, madrasah didorong untuk lebih produktif dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan institusi Lembaga Pendidikan Islam. Kemajuan bahwa apabila konsep

¹⁵ Siti Mustaghfiroh, "Konsep 'Merdeka Belajar' Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey," *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (March 30, 2020): 141–47, <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>.

¹⁶ Janner Simarmata et al., *Literasi Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021). 11

kurikulum merdeka belajar diterapkan secara holistik, niscaya peserta didik mempunyai peluang besar untuk mendapat pengalaman keilmuan, keterampilan, dan kemanusiaan yang lebih kaya dan komprehensif. Implementasi kurikulum merdeka belajar itu bersifat opsional (pilihan), bukan obligasional, maka *kick-off* tidaknya rencana pembelajaran secara merdeka ini sangat tergantung pada pimpinan Lembaga Pendidikan Islam dengan kebijakan yang ditetapkannya. Pertimbangan rasional dan prospek kedepan tentu mengantarkan kepada pilihan bijak dan strategis bahwa merdeka belajar itu menjadi sistem pembelajaran alternatif yang diproyeksikan sehingga dapat membuahkan hasil dan sasaran tujuan sistem pendidikan yang efektif berkemajuan.¹⁷ Dalam hal ini, Islam menghendaki umatnya untuk selalu melakukan perubahan internal yang positif (sikap mental, pemikiran, dan moral) menuju *khaira ummah* (umat terbaik) melalui proses pendidikan dan pembelajaran efektif, konstruktif, dan produktif.

Untuk membebaskan proses pembelajaran, diperlukan beberapa langkah konkrit, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur, peneliti mengumpulkan data penting dari Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga beberapa Kepala Madrasah di Provinsi Jawa Timur.

Perencanaan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam

Dalam aspek perencanaan, peneliti menelusuri fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa konsep kurikulum merdeka belajar di Provinsi Jawa Timur direncanakan melalui dua kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah melalui sosialisasi kurikulum merdeka belajar. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh pemangku kepentingan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dalam aspek perencanaan. Kegiatan sosialisasi digagas oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Madrasah Kementerian Agama dan dihadiri seluruh kepala madrasah yang berada di bawah naungannya masing-masing, mulai dari tingkat PIAUD hingga MA.

¹⁷ Sufirmansyah Sufirmansyah et al., "Student's Preferences in Using Video-Based Learning Applications and Its Efficiency in Higher Education," *Nazbruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (June 30, 2021): 272–83, <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1474>.

Pilar pertama dari kurikulum merdeka belajar adalah pengganti Ujian Nasional. Sistem evaluasi Ujian Nasional dari waktu ke waktu selalu berubah. Kriteria kelulusan lebih fleksibel ditambah dengan peningkatan persentase kelulusan. Untuk itu keterlibatan guru yang lebih luas dalam penilaian akhir Peserta Didik harus didorong oleh masing-masing sekolah. Penilaian tidak harus dilakukan dalam bentuk tes tertulis, karena dapat dilakukan melalui portofolio, penugasan, proyek, dan sebagainya. Melalui penilaian yang lebih komprehensif seperti ini, tentunya kelulusan peserta didik menjadi bermakna.

Pilar kedua dari kurikulum merdeka belajar merupakan pengganti Ujian Nasional dengan Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Salah satu alasan utama penggantian ini adalah karena Ujian Nasional terlalu berorientasi kognitif, padahal karakter Peserta Didik juga penting untuk dijaga dan dievaluasi internalisasinya. Oleh sebab itu dilaksanakannya Penilaian Kompetensi Minimum Nasional dan Survei Karakter, guru menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan pembelajaran sekaligus menilai Peserta Didiknya. Penilaian dilakukan bukan berdasarkan kemampuan penguasaan materi sesuai kurikulum saja, tetapi dirancang untuk memetakan dan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Penilaian Kompetensi Minimum berfokus pada penguasaan kompetensi literasi dan numerasi yang akan diukur.

Pilar ketiga dari kurikulum merdeka belajar adalah kebijakan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama ini guru disibukkan dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sangat rinci. Saat ini hanya butuh satu lembar RPP yang harus disiapkan dengan tetap memenuhi kriteria minimal yang telah ditentukan. Dengan demikian, meskipun hanya satu lembar RPP tersebut tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Optimalisasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terletak pada seberapa tepat metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran tertentu, dan bagaimana lebih dipahami oleh setiap Peserta Didik.¹⁸

Pilar keempat Kebebasan Belajar adalah optimalisasi sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Harapannya adalah mewujudkan Tricenter Pendidikan dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Sah dan secara formal, sistem zonasi tidak mengakomodir

¹⁸ Zainal Arifin, "Peningkatan Kemampuan Guru dalam Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 1 Halaman Melalui Workshop Daring dengan Variasi Model Jigsaw di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar (SD) Negeri Genteng 2 Bangkalan," *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 3, no. 2 (December 31, 2020): 201–15, <https://doi.org/10.19105/rejiem.v3i2.4722>.

perbedaan situasi wilayah yang tentunya memiliki keunikannya masing-masing.¹⁹

Kegiatan kedua dalam aspek perencanaan kurikulum merdeka belajar di Provinsi Jawa Timur sedang mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Untuk mendukung perencanaan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan semua pihak dalam mempersiapkan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur yang dimaksud berupa EMIS (*Education Management Information System*) dan sistem e-learning seperti PINTAR (Pusat Informasi Pelatihan dan Pembelajaran) serta aplikasi Mandiri Belajar. EMIS disiapkan secara terpusat agar data dapat tersinkronisasi secara nasional. EMIS sendiri merupakan bentuk *Open Government Data*,²⁰ dibuat dan disajikan untuk mendukung kebijakan agar tepat sasaran, sehingga nantinya dengan mudah EMIS menyajikan data terbuka yang lengkap, valid, terintegrasi, dan transparan.

Infrastruktur pendukung kedua untuk pelaksanaan kurikulum merdeka belajar adalah sistem e-learning, sejak bulan April 2022 Kementerian Agama juga meluncurkan aplikasi bernama Pintar dan Mandiri Belajar. Kedua aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem vital berbasis website dalam meningkatkan kapasitas kemampuan Guru dan Peserta Didik, serta juga mendukung kebijakan belajar gratis. Melalui ini, setiap operator Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah diberikan akses untuk menyinkronkan semua data madrasah masing-masing ke penyimpanan cloud online dalam skala nasional. Meski diawal peluncurannya sering terjadi error, kini semuanya bisa berjalan menjadi lebih baik. Pemanfaatan aplikasi Pintar dan Mandiri Belajar akan meningkatkan kemampuan Guru dan hasil belajar Peserta Didik secara tidak langsung. Tujuan penggunaan *e-learning* dalam sistem Pendidikan Islam ini adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat luas, serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.²¹

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam

¹⁹ Ahmad Mashudi, "Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Jawa Timur," *Nidbomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (October 5, 2019): 186–206, <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>.

²⁰ Nadia Mukhlisa and Azhar Kasim, "Open Government Data : Open Data Pada Sektor Pendidikan Dalam Mendukung Kebijakan," *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (August 31, 2021): 125– 43, <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5489>.

²¹ Suharyanto Suharyanto and Adele B. L. Mailangkay, "Penerapan E-Learning Sebagai Alat Bantu Mengajar dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Widya* 4, no. 3 (2018): 17– 21.

Kurikulum merdeka belajar pada Lembaga Pendidikan Islam di Provinsi Jawa Timur diimplementasikan dalam tiga proses. Proses pertama, kurikulum merdeka belajar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing Madrasah. Langkah kedua adalah mengikuti program Pusdiklat yang telah digagas oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan langkah ketiga adalah mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik.

Sangat simpel, konsep kurikulum merdeka belajar dilaksanakan dengan tetap mengacu pada empat pilar utama, yaitu aspek yang terkait dengan pelaksanaan Ujian Madrasah Standar Nasional (UMBN), Ujian Nasional (UN), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya sangat variatif, tergantung kemampuan masing-masing madrasah.

Kurikulum merdeka belajar di Provinsi Jawa Timur juga dilaksanakan melalui Program aplikasi Pintar. Program aplikasi Pintar merupakan upaya mewujudkan visi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui penciptaan peserta didik berkarakter. Program aplikasi Pintar berfokus pada pengembangan kapasitas Guru secara holistik yang meliputi kompetensi (literasi dan numerasi), dimulai dengan sumber daya manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Empat target utama dari Program aplikasi Pintar dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, pada aspek kompetensi Guru, diharapkan dalam tiga tahun ke depan dapat melebihi target atau di atas level yang diharapkan. Kedua, pada aspek lingkungan belajar diharapkan lebih aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Ketiga, pada aspek pembelajaran dapat lebih diimplementasikan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan pada aspek keempat, diharapkan mampu merumuskan rencana program dan anggaran berdasarkan refleksi diri, refleksi guru, dan peningkatan pembelajaran, sehingga berdampak pada madrasah lain.

Selanjutnya intervensi Program aplikasi Pintar meliputi lima hal, yakni pendampingan konsultasi, penguatan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru dan inovasi baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi madrasah. Program aplikasi Pintar juga memiliki beberapa manfaat bagi madrasah. Pertama, meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Kedua, percepatan digitalisasi madrasah. Ketiga, mempercepat pencapaian profil peserta didik berkarakter. Keempat, meningkatkan kompetensi kepala madrasah dan guru. Kelima, memberikan kesempatan kepada madrasah untuk menjadi katalisator perubahan bagi madrasah lain. Keenam, mendapatkan

pendampingan intensif untuk transformasi madrasah. Dan ketujuh mendapatkan tambahan anggaran untuk pengadaan bahan ajar pembelajaran paradigma baru.²²

Penggunaan Teknologi Informasi juga menjadi salah satu faktor utama dalam mengikuti Program aplikasi Pintar. Pemanfaatan platform aplikasi Pintar untuk pembelajaran dan pengelolaan madrasah, bertujuan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka belajar yang akan diterapkan pada satuan Lembaga Pendidikan Islam. Ada dua fungsi platform aplikasi Pintar bagi guru di satuan Lembaga Pendidikan Islam. Yang pertama adalah platform teknologi pembelajaran, yang bertujuan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Kedua, platform teknologi pengembangan profil dan kompetensi guru, yang bertujuan untuk membantu kegiatan pengelolaan profil guru dan mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.

Berikutnya adalah platform teknologi sumber daya madrasah, yang bertujuan untuk membantu kepala satuan Lembaga Pendidikan Islam, bendahara, dan pengawas dalam mengelola sumber daya satuan lembaganya secara lebih tepat, mudah, dan efisien.²³ Dan terakhir, platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan adalah ditujukan untuk membantu kepala satuan Lembaga Pendidikan Islam dan pengawas mengembangkan program peningkatan kualitas yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil peserta didik berkarakter. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan dengan empat cara. Pertama, adalah penggunaan kurikulum merdeka belajar yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan dan penguatan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil peserta didik berkarakter. Kedua, adalah penerapan pembelajaran mengikuti tahapan prestasi belajar peserta didik. Ketiga, penggunaan berbagai perangkat pengajaran termasuk buku teks dan RPP sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dan yang keempat adalah pembelajaran melalui proyek untuk memperkuat pencapaian profil peserta didik berkarakter.²⁴

²² A. Muri Yusuf, *Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

²³ Heppy Puspitasari, "Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah," *Muslim Heritage* 2, no. 2 (January 1, 2018): 339–68, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.1115>.

²⁴ Agus Sarifudin, "Peningkatan Kinerja Guru dalam Implementasi Penilaian Sistem SKS Melalui Supervisi Akademik Pengawas Sekolah," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 02 (August 29, 2019): 417–34, <https://doi.org/10.30868/ei.v8i2.539>.

Kemudian untuk fakta di lapangan menunjukkan masih ada beberapa pihak yang kesulitan mengakses platform aplikasi Pintar dan Mandiri Belajar. Oleh karena itu, banyak madrasah yang menggunakan aplikasi lain sebagai alternatif. Dan juga masih banyak madrasah yang menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Ruangguru, Moodle, Zoom, bahkan WhatsApp. Memang setiap madrasah menghadapi kendala yang berbeda-beda, oleh karena itu madrasah diperbolehkan menggunakan aplikasi lain yang dapat mengakomodir kebutuhan Peserta Didik.

Hambatan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam

Tafsir pemahaman guru terkait konsep kurikulum merdeka belajar sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan di Madrasah. Contoh di Kota Keidiri Provinsi Jawa Timur, guru yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka belajar rata-rata memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan untuk belajar di bawah konsep kurikulum merdeka belajar. Sedangkan untuk yang belum pernah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka belajar, guru belum memahami sepenuhnya cara pelaksanaannya mengenai kurikulum merdeka belajar dalam proses pembelajaran.

Tafsir pemahaman guru berimplikasi pada kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir maksud dan tujuan dari kurikulum merdeka belajar. Peneliti menemukan fakta bahwa sebagian guru dapat dikatakan belum siap melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan tujuan kurikulum merdeka belajar. Hal ini terjadi terutama karena faktor usia yang berhubungan dengan keengganan untuk belajar IT. Ada yang tidak mau repot dengan variasi metode pembelajaran karena alasan selama ini mengajar sudah begitu rumit.

Dari beberapa fakta di atas, peneliti berkesimpulan sementara bahwa implementasi dari kurikulum merdeka belajar di Provinsi Jawa Timur mengalami dua kendala utama. Pertama, belum meratanya pemahaman dan kesiapan guru dalam menerapkan konsep kurikulum merdeka belajar. Kedua, keterbatasan pelaksanaan pembelajaran berbasis digital karena latar belakang ekonomi wali peserta didik yang bervariasi dan kesiapan madrasah yang belum merata dalam melakukan pembelajaran berbasis digital.

Solusi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam

Pemaparan berbagai pelaksanaan hingga hambatan dari konsep kurikulum merdeka belajar di Provinsi Jawa Timur yang telah dijelaskan pada poin-poin di atas, peneliti menemukan beberapa solusi yang telah dicoba dan

diterapkan. Solusi pertama adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan workshop dan rapat terbatas bertajuk implementasi kurikulum merdeka belajar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman guru tentang konsep dan praktik pembelajaran dari kurikulum merdeka belajar.

Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Madrasah berkoordinasi dengan Kepala Kementrian Agama di Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi kegiatan workshop dan rapat terbatas untuk guru dan kepala madrasah. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pemahaman guru tentang konsep dan praktik dari kurikulum merdeka belajar.²⁵

Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Madrasah juga beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang implementasi kurikulum merdeka belajar kepada semua guru madrasah. Kemudian diharapkan selepas mengikuti sosialisasi tersebut, madrasah juga mengadakan rangkaian lokakarya mengenai kurikulum merdeka belajar melalui Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) secara berkelanjutan, dan agenda tersebut harus diadakan secara rutin minimal satu kali dalam satu semester.²⁶

Pentingnya workshop, sosialisasi, dan lokakarya seperti itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sekaligus pemahamannya.²⁷ Contoh konkrit yang pernah terjadi di daerah lain adalah workshop implementasikan kurikulum merdeka belajar di MTsN 2 Tulungagung. Melalui kegiatan workshop tersebut guru lebih memahami bagaimana konsep, penerapan, dan evaluasi, serta proses implementasi pemenuhan mutu yang menjadi dasar pelaksanaan dari kurikulum merdeka belajar.

Contoh lainnya adalah peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui rapat terbatas yang siap berlakukan kurikulum merdeka belajar di MTsN 1 Sinjai. Melalui rapat terbatas tersebut, guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogiknya dalam menyusun perangkat pembelajaran yang komprehensif untuk menunjang kesiapannya dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar.

²⁵ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: Transaction Publishers, 2017), 105.

²⁶ Nurhikmah Nurhikmah, Isti Hidayah, and Sri Kadarwati, "Persepsi Dan Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum," *Cokroaminoto Journal of Primary Education* 4, no. 1 (April 30, 2021): 78–83, <https://doi.org/10.30605/cjpe.412021.1294>.

²⁷ Wahyu Satriawan, Iffa Dian Santika, and Amin Naim, "Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah Dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif," *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (June 4, 2021): 1–12, <https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i1.7633>.

SIMPULAN

Kurikulum merupakan sarana yang sangat penting dalam pendidikan. Rencana pendidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Tujuan kurikulum merdeka belajar adalah untuk memudahkan peserta didik dalam belajar, mendorong peserta didik agar selalu berinovasi, berkarakter, dan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan, serta peserta didik memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kebutuhan masa depannya. Seyogiannya kurikulum merdeka belajar untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dengan sistem pendidikan OBE (*Outcome Based Education*) agar lulusan dari peserta didik fokus pada learning outcome yang relevan.

Konsep kurikulum merdeka belajar selaras dengan nilai-nilai Islam. Karena seyogiannya pendidikan membutuhkan dukungan kuat dari sebuah suatu institusi yang konsen terhadap kepentingan nilai agama Islam tersebut. Kebijakan yang sudah ditetapkan dan tertuang dalam kurikulum madrasah telah menunjukkan adanya dukungan kuat terhadap tercapainya harapan tersebut. Pendekatan yang dilakukan kepada peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Islam melalui prespektif kurikulum merdeka belajar adalah proses pembudayaan nilai agama Islam yang berbasis pada tujuan masyarakat. Adanya indikator nilai-nilai keislaman yang bertumpu pada keimanan dan ketakwaan yang telah dibudayakan madrasah dapat dianalisa melalui beberapa hal berikut: (1) adanya komitmen dari peserta didik terhadap hal-hal yang diperintahkan dan yang dilarang Agama Islam, (2) adanya motivasi dari peserta didik untuk semangat mempelajari ajaran Agama Islam, (3) adanya partisipasi aktif oleh peserta didik dalam berbagai kegiatan keislaman, (4) adanya sikap toleransi peserta didik dalam beragama bahkan hingga pada simbol-simbol agama, (5) semangat dalam memahami dan mempelajari kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup peserta didik, (6) Peserta didik memprioritaskan pendekatan Agama Islam dalam menentukan pilihan, dan (7) Ajaran Agama Islam dijadikan sebagai sumber dan landasan oleh peserta didik untuk pengembangan gagasan dan pemikiran.

Kegiatan sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis dari implementasi kurikulum merdeka belajar tersebut harus terus dicanangkan, dan melalui Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Madrasah Kementerian Agama selalu memberi pengarahannya agar penerapan kurikulum merdeka ini segera terealisasi di seluruh Madrasah di Indonesia mulai dari tingkat PIAUD hingga MA. Sedangkan untuk mendukung perencanaan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan semua pihak dalam mempersiapkan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur yang dimaksud berupa EMIS (*Education Management*

Information System) dan sistem e-learning. EMIS disiapkan secara terpusat agar data dapat tersinkronisasi secara nasional. Sama halnya dengan sistem e-learning, namun madrasah diberikan kewenangan penuh jika ingin menggunakan aplikasi lain. Tafsir pemahaman guru terkait konsep kurikulum merdeka belajar sangat berdampak pada kesiapan guru untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar di madrasah-madrasah. Faktor usia, keengganan untuk mengembangkan kapasitas diri atau belajar IT, dan keengganan untuk menerapkan berbagai metode menggunakan media pembelajaran yang inovatif menjadi kendala utama. Di lain sisi, keterbatasan sarana prasarana berupa perangkat mobile atau laptop juga menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya pembelajaran berbasis digital yang sulit sekali menginovasi pembelajaran model terkini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Zainal. "Peningkatan Kemampuan Guru dalam Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 1 Halaman Melalui Workshop Daring dengan Variasi Model Jigsaw di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar (SD) Negeri Genteng 2 Bangkalan." *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 3, no. 2 (December 31, 2020): 201–15. <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v3i2.4722>.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Transaction Publishers, 2017.
- Hidayah, Lutviyana. "Asemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya: Indonesia." *Al-Mafahim: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 2 (2020): 11–20.
- Houtman, Houtman. "MERDEKA BELAJAR DALAM MASYARAKAT 5.0." Universitas PGRI Palembang: Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2020.
- Ismail, H. Fajri. "Pro Kontra Ujian Nasional." *Al-Rivayah : Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (September 1, 2015): 301–24.
- Istiq'faroh, Nurul. "Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia." *Lintang Songo : Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (August 31, 2020): 1–10.
- Kusumah, Wijaya, and Tuti Alawiyah. *GURU PENGGERAK: Mendorong Gerak Maju Pendidikan Nasional*. Surabaya: Penerbit Andi, 2021.

- Mulyasa, H. E. *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Translated by Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Mashudi, Ahmad. “Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Jawa Timur.” *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (October 5, 2019): 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>.
- Mukhlisa, Nadia, and Azhar Kasim. “Open Government Data : Open Data Pada Sektor Pendidikan Dalam Mendukung Kebijakan.” *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (August 31, 2021): 125–43. <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5489>.
- Mustaghfiroh, Siti. “Konsep ‘Merdeka Belajar’ Perspektif Aliran Progressivisme John Dewey.” *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (March 30, 2020): 141–47. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>.
- Masduki Duryat. *“DEWA” Mengabdikan Untuk Negeri; Membangkitkan Kejemawaan Dan Konsistensi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Nurhikmah, Nurhikmah, Isti Hidayah, and Sri Kadarwati. “Persepsi Dan Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum.” *Cokroaminoto Journal of Primary Education* 4, no. 1 (April 30, 2021): 78–83. <https://doi.org/10.30605/cjpe.412021.1294>
- Puspitasari, Heppy. “Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah.” *Muslim Heritage* 2, no. 2 (January 1, 2018): 339–68. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.1115>.
- Rusmana, Fattah Amal Iko. “Memerdekakan Siswa Melalui Pendidikan: Konsepsi Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (1889-1959).” Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. <http://repository.unj.ac.id/724/>.
- Rohim, Dhina Cahya. “Konsep Asesmen Kompetensi Minimum Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar.” *Jurnal VARIDIKA* 33, no. 1 (July 30, 2021): 54–62. <https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.14993>.
- Sani, Ridwan Abdullah. *Pembelajaran Berorientasi AKM: Asesmen Kompetensi Minimum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

- Suharyanto, Suharyanto, and Adele B. L. Mailangkay. "Penerapan Elearning Sebagai Alat Bantu Mengajar dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Widya* 4, no. 3 (2018): 17–21.
- Sarifudin, Agus. "Peningkatan Kinerja Guru dalam Implementasi Penilaian Sistem Sks Melalui Supervisi Akademik Pengawas Sekolah." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 02 (August 29, 2019): 417–34. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i2.539>.
- Sari, Ayang, Syahnan Daulay, Yola Yuliani Putri, and Pita Epriani. "Penghapusan Ujian Nasional Tahun 2021 Dalam Perspektif Guru SMA Di Kota Tebing Tinggi." In *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI) - 3*, 213–20. FBS Unimed Press, 2021. <http://digilib.unimed.ac.id/41244/>.
- Satriawan, Wahyu, Iffa Dian Santika, and Amin Naim. "Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah Dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif." *Alldarab : Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (June 4, 2021): 1–12. <https://doi.org/10.24042/alidarab.v11i1.7633>.
- Simarmata, Janner, Jay Idoan Sihotang, Abdul Karim, Ramen A. Purba, Hazriani Hazriani, Mayko Edison Koibur, Dudih Gustian, Muhammad Noor Hasan Siregar, Yusra Fadhillah, and Jamaludin Jamaludin. *Literasi Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sufirmansyah, Sufirmansyah, Laudria Nanda Prameswati, Dewi Trisna Wati, and Endang Sulistyowati. "Student's Preferences in Using VideoBased Learning Applications and Its Efficiency in Higher Education." *Naẓḥruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (June 30, 2021): 272–83. <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1474>.
- Tsani, Iskandar, Addin Arsyadana, Sufirmansyah Sufirmansyah, and El Shafira. "Evaluasi Model Cipp Pada Pembelajaran Pai Dan Budi Pekerti Di SMA Negeri 7 di Provinsi Jawa Timur." *Al-Tadẓkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (July 11, 2021): 17–45. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.8165>.
- Wisudayanti, Kadek Ari. "Kesiapan Menghadapi Perubahan Pada Guru Sekolah Dasar Terhadap Pendidikan Multikultural." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 2, no. 1 (July 5, 2021): 75–86.
- Yusuf, A. Muri. *Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2017.